



Media Title	Investor Daily		
Head Line	Bandara Buleleng akan Dilengkapi Akses Tol		
Date	10 Maret 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	tm	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

## Bandara Buleleng akan Dilengkapi Akses Tol

DENPASAR - Bandara Internasional Buleleng (BIB), Bali yang akan dibangun, bakal dilengkapi dengan akses jalan tol. Bandara baru tersebut direncanakan untuk dibangun guna mengantisipasi kepadatan Bandara Internasional I Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

"Untuk menunjang rencana pembangunan Bandara Buleleng, Kementerian Pekerjaan Umum sudah menyiapkan rencana sistem jaringan jalan nasional dan jalan tol yang menghubungkan Bali bagian selatan dan utara, dari Denpasar ke Singaraja," kata Direktur PT Marga Jaya Anak Agung Ngurah Putu Wirawan dalam seminar bertajuk *Pembangunan Infrastruktur Strategis* yang digelar di Puri Agung Singaraja, Bali, akhir pekan lalu.

Kabid Jalan Tol dan Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Riel J Mantik mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa kajian terkait rencana pembangunan akses jalan untuk Bandara Buleleng. Jaringan jalan nasional yang dikaji tersebut mulai dari kawasan Jalan Gatot Subroto, Mengwi, Ubud, Bedugul, Kintamani, Tamblang, hingga tembus ke Singaraja.

"Ada beberapa kajian, jalan yang arahnya ke Buleleng, ditarik garis mulai dari Mengwi, Seririt hingga turun di Singaraja. Tapi, kami akui geometriknya cukup susah. Solusinya bisa dibuat terowongan di daerah perbukitan. Jaringan jalan Denpasar-Singaraja ini nantinya sepanjang kurang lebih 80 kilometer, bisa ditempuh dalam waktu kurang dari satu jam. Tapi, ini semua masih kami kaji," papar dia.

Namun demikian, jaringan jalan Denpasar-Singaraja untuk menunjang pembangunan bandara baru di Buleleng ini, harus didukung ketersediaan lahan. Karena tanpa dukungan lahan, proyek akan sulit diwujudkan.

"Kendala utama adalah lahan. Jalan tol dari selatan ke utara ini bisa terwujud jika ada pengertian pemilik lahan bahwa ini untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga tol bisa terwujud dengan cepat," kata dia.

### Bentuk BUMD

Di sisi lain, Anak Agung Ngurah Putu Wirawan mengungkapkan, badan usaha milik daerah (BUMD) bidang infrastruktur perlu dibentuk di Bali

untuk bisa mempercepat pembangunan bandara baru di Buleleng.

"Selain membangun bandara baru di Buleleng, nantinya juga perlu dibangun sebuah *aerocity*, yaitu kawasan kota baru di sekitar bandara," kata dia.

Wirawan juga mengungkapkan, keberadaan bandara baru itu akan membuat Buleleng menjadi kota besar, seperti di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Provinsi Banten. "Di sekitar bandara itu kini telah berkembang menjadi kota-kota baru," ujar dia.

Bandara di Buleleng dan kota baru yang akan muncul di sekitarnya, kata Ngurah Wirawan, harus dirancang agar kepemilikannya tidak sepenuhnya dikuasai pihak asing. Masyarakat Bali dan Buleleng diharapkan bisa ikut serta di dalam kepemilikannya.

"Bagaimana agar kota baru ini bukan milik orang asing, saya kira harus dibentuk badan usaha milik daerah (BUMD). Di situ lah kekuatan dan keterwakilan kita ada. Dengan demikian, bandara dan kota baru di sekitarnya tidak dikuasai oleh korporasi raksasa," jelas dia.

Wirawan menuturkan, saat ini Pemprov Bali, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar sudah memiliki saham jalan tol di atas laut yang baru selesai dibangun. Kepemilikan serupa diharapkan dapat diwujudkan di bandara baru Buleleng.

"Kita harus punya pemikiran bagaimana agar punya saham di Bandara Buleleng. Kita harus optimalkan aset daerah, jangan terbengkalai. Aset tanah yang dimiliki itu bisa dijadikan penyertaan modal dalam pembangunan bandara baru," papar dia seperti dikutip dari *Antara*.

Lahan, kata Wirawan, menjadi kunci dalam pembangunan bandara baru di Kabupaten Buleleng.

Kalau betul di daerah Kubutambahan ada tanah adat seluas 400 hektare, lanjut dia, itu bisa dijadikan penyertaan modal. Kalau sudah ada lahan, gubernur dan bupati sudah bisa menghadap presiden untuk mengajukan konstruksi landasan pacu bandara.

"Itu bisa terwujud jika sudah ada BUMD. Maka, harus segera dibentuk badan usaha, misalnya PT Bali Infrastruktur. BUMD ini nantinya bisa minta DPRD untuk mengalokasikan anggaran guna membiayai badan usaha yang dibentuk itu," jelas dia. (tm)